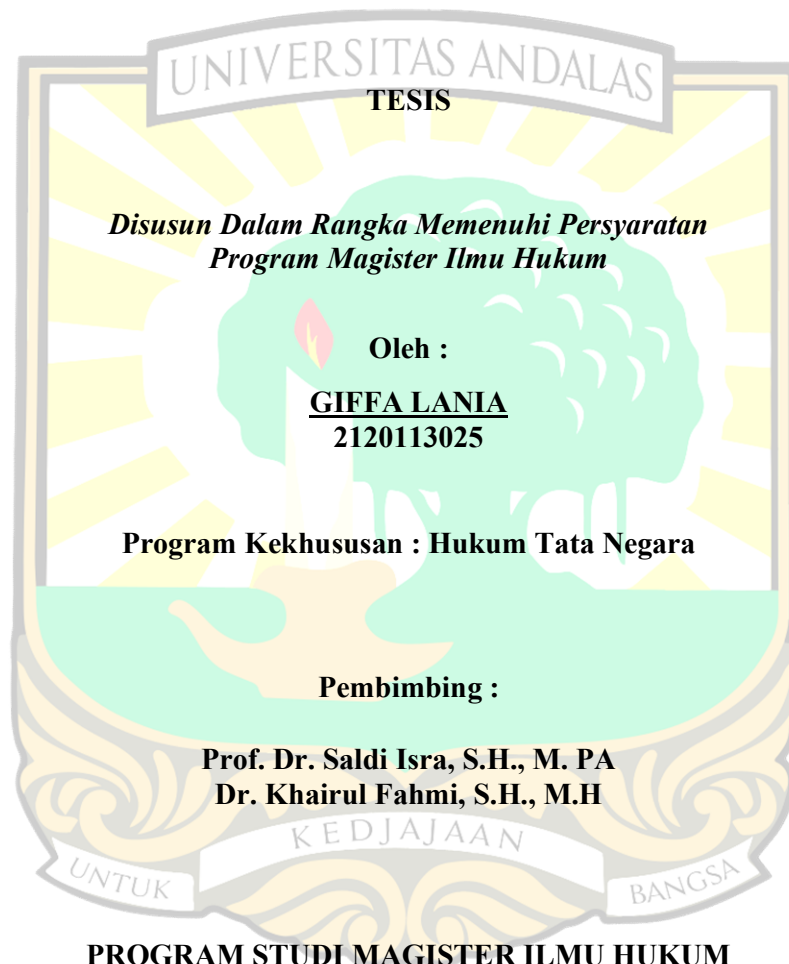




**PEMENUHAN KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT CALON
KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

**PEMENUHAN KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT CALON
KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**(Giffa Lania, 2120113025, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 164 Halaman, 2026)**

ABSTRAK

Pemilihan serentak yang dilaksanakan sejak tahun 2015, dilanjutkan tahun 2020 dan 2024, dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, dan konsolidasi demokrasi. Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen dalam mewujudkan prinsip demokrasi di Indonesia, dan penyelenggaraannya menunjukkan proses demokrasi yang sehat. Dalam Pemilihan Tahun 2024, pemenuhan keabsahan syarat dokumen calon kepala daerah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pada beberapa kasus, Calon Kepala Daerah yang mendapatkan hasil suara terbanyak, dan sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pemenang, pada akhirnya didiskualifikasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi akibat adanya proses pemenuhan syarat yang tidak terpenuhi. Hal tersebut melatarbelakangi pertanyaan dalam penelitian tesis ini, yaitu; 1. Bagaimana pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon dalam proses pendaftaran calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota? 2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap penetapan pasangan calon apabila keabsahan dokumen dinyatakan tidak sah setelah penetapan calon? Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota telah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, proses verifikasi keabsahan dokumen dilakukan oleh KPU dengan melibatkan lembaga/instansi terkait untuk memastikan bahwa dokumen yang dikeluarkan memang benar dari lembaga/instansi tersebut. 2. Konsekuensi hukum terhadap penetapan pasangan calon yang dokumennya dinyatakan tidak sah mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum, tidak terlaksananya Pemilihan yang sesuai dengan asas, dan berpotensi menimbulkan beban keuangan negara, terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung memprioritaskan prinsip substantif untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak warga, dari pada ketatnya prosedur formal semata.

Kata Kunci: Pemenuhan Keabsahan Dokumen, Syarat Calon Kepala Daerah, Konsekuensi Hukum, Pemilihan Serentak.

**THE FULFILLMENT OF THE VALIDITY OF DOCUMENTS AS
REQUIREMENTS FOR REGIONAL HEAD CANDIDATES IN THE 2024
SIMULTANEOUS ELECTIONS**

**(Giffa Lania, 2120113025, Master of Law Studies Program,
Faculty of Law, Page 164, Andalas University, 2026)**

ABSTRACT

Simultaneous elections, held since 2015 and continued in 2020 and 2024, aim to strengthen the effectiveness, efficiency, and consolidation of democracy. Regional head elections serve as an important instrument for realizing democratic principles in Indonesia, and their implementation reflects a healthy democratic process. In the 2024 elections, the fulfillment of the validity of regional head candidate requirement documents became a subject of dispute before the Constitutional Court. In several cases, candidates who obtained the highest number of votes and were officially declared winners by the Provincial/Regency/City General Election Commission were ultimately disqualified due to unmet document validity requirements. This context underlies the research questions of this thesis: (1) How is the fulfillment of candidate document validity carried out during the registration process by the Provincial/Regency/City General Election Commission? (2) What are the legal consequences for the determination of candidate pairs if their documents are declared invalid after candidate determination? This thesis employs normative legal research using a statutory approach. The study concludes that: (1) In the 2024 Simultaneous Elections, the Provincial/Regency/City General Election Commission conducted candidate registration stages in accordance with applicable laws, involving relevant institutions to ensure that issued documents were authentic. (2) Legal consequences arising from the invalidity of candidate documents create legal uncertainty, undermine the principled conduct of elections, and may impose financial burdens on the state. Constitutional Court decisions demonstrate a tendency to prioritize substantive principles, such as justice and the protection of citizens' rights, over strict formal procedures.

Keywords: *Fulfillment of Document Validity, Eligibility Requirements for Regional Head Candidates, Legal Consequences, Simultaneous Elections.*